

PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN PONOROGO

*Khusniati Rofiah**

Abstrak:

Salah bentuk pemberdayaan ekonomi umat adalah dengan mengembangkan kewirausahaan yang dilakukan oleh rakyat kecil yang sering disebut dengan istilah usaha kecil mikro (UKM). Lembaga Keuangan Mikro (LKM) merupakan lembaga keuangan yang secara naluriah lebih cocok dengan UKM, dikarenakan menyediakan jasa-jasa keuangan bagi penduduk yang berpendapatan rendah dan termasuk dalam kelompok miskin. Di kabupaten Ponorogo, lembaga keuangan mikro yang banyak berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah BMT dan KSP. Dalam hal ini yang dijadikan sampel adalah BMT Surya Mandiri dan KSP Baku Makmur. Hasil penelitian menunjukkan pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan oleh BMT Surya Mandiri dalam bentuk penghimpunan dan penyaluran dana (pembiayaan) masuk dalam tahapan inisiator saja, belum masuk pada tahapan fasilitator dan pendampingan. Sedangkan pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan oleh KSP Baku Makmur dalam bentuk inisiator, fasilitator dan pendampingan, dilaksanakan dalam bentuk penghimpunan dan penyaluran dana, dilanjutkan dalam bentuk pembinaan dan pendampingan kelompok ekonomi perempuan-berkaitan dengan manajemen usaha anggota dan ekonomi rumah tangga. Prosedural pemberian pembiayaan atau pinjaman produktif bagi UKM di BMT Surya mandiri maupun di KSP Baku Makmur sangat mudah dan cepat, walaupun keduanya mewajibkan persyaratan adanya jaminan. Dalam melakukan pembiayaan terhadap UKM, BMT Surya mandiri menggunakan sistem mudârabah, dengan menentukan besarnya bagi hasil berdasarkan besarnya pokok pinjaman bukan laba. Sementara KSP Baku makmur menggunakan sistem bunga yang ringan. Dampak pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BMT maupun KSP

* Penulis adalah Dosen Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo.

adalah secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja.

Kata Kunci: BMT, KSP, *mudârabah*, kewirausahaan.

PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh dan mandiri, menurut Ginandjar bisa dilakukan dengan konsep pemberdayaan ekonomi umat.¹ Salah bentuk pemberdayaan ekonomi umat adalah dengan mengembangkan kewirausahaan yang dilakukan oleh rakyat kecil yang sering disebut dengan istilah usaha kecil mikro (UKM). Peranan UKM terutama sejak krisis moneter tahun 1997 dapat dipandang sebagai katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja. Krisis ini telah mengakibatkan kedudukan posisi pelaku sektor ekonomi berubah. Usaha besar satu persatu pailit karena bahan baku impor meningkat secara drastis, biaya cicilan utang meningkat sebagai akibat dari nilai tukar rupiah terhadap dolar yang menurun dan berfluktuasi. Sektor perbankan yang ikut terpuruk turut memperparah sektor industri dari sisi permodalan. Banyak perusahaan yang tidak mampu lagi meneruskan usaha karena tingkat bunga yang tinggi. Berbeda dengan UKM yang sebagian besar tetap bertahan, bahkan cenderung bertambah.

Perkembangan sektor UKM yang demikian menyiratkan bahwa terdapat potensi yang besar atas kekuatan domestik, jika hal ini dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik tentu akan dapat mewujudkan usaha kecil yang tangguh. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya pemberdayaan UKM baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya.² Namun, disisi yang lain UKM juga masih dihadapkan pada masalah mendasar yang secara garis besar mencakup: *pertama*, masih sulitnya akses UKM pada pasar atas produk-produk yang dihasilkan, *kedua*, masih lemahnya pengembangan dan penguatan usaha, serta *ketiga*, keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-lembaga keuangan formal khususnya dari perbankan.

1 Ginandjar Kartasasmita, "Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Kemitraan Guna Mewujudkan Ekonomi Nasional Yang Tangguh Dan Mandiri", makalah disampaikan Pada *Seminar Nasional Lembaga Pembinaan Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi (LP2KMKGOLKAR)* Jakarta: 7 Nopember 1996, www.Ginandjar.com

2 Pandji Anoraga dan Djoko Sudantoko, *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 224.

Keterbatasan akses sumber-sumber pembiayaan yang dihadapi oleh UKM khususnya pelaku Usaha Kecil Mikro (UKM) terutama dari lembaga-lembaga keuangan formal seperti perbankan, menyebabkan mereka bergantung pada sumber-sumber informal. Bentuk dari sumber-sumber ini beraneka ragam mulai dari pelepas uang (*rentenir*) hingga berkembang dalam bentuk unit-unit simpan pinjam, koperasi dan bentuk-bentuk lainnya yang lazim disebut sebagai Lembaga Keuangan Mikro (LKM).

Dalam perkembangannya, lembaga keuangan mikro ini lebih mengena di kalangan pelaku UKM karena sifatnya yang lebih fleksibel, misalnya dalam hal persyaratan dan jumlah pinjaman yang tidak seketat persyaratan perbankan maupun keluwesan pada pencairan kredit. Hal ini merupakan salah satu indikator bahwa keberadaan lembaga keuangan mikro sesuai dengan kebutuhan pelaku UKM, yang umumnya membutuhkan pembiayaan sesuai skala dan sifat usaha kecil.

Oleh karena begitu pentingnya keberadaan lembaga keuangan mikro bagi UKM, maka jumlah LKM dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang pesat, baik jumlah unitnya maupun jumlah nasabahnya di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Ponorogo.³ Di antara jenis lembaga keuangan mikro (LKM) yang fokus dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Ponorogo adalah *Bayt al-mál wa altamwíl* (BMT) dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Walaupun keduanya memiliki banyak kesamaan, namun tingkat perkembangannya antara BMT dan KSP di Kabupaten Ponorogo terjadi perbedaan yang sangat signifikan. Jumlah BMT pada awal berdirinya sekitar tahun 1997 berjumlah 21 unit, kemudian tahun 2001 berkembang menjadi 29 unit, dan pada tahun 2011 ini yang masih eksis dan terdaftar di Indakop tinggal 3 unit⁴. Sementara jumlah KSP dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat pesat. Pada tahun 2008 jumlah KSP sebanyak 89 unit, dan pada tahun 2011 ini jumlah KSP yang terdaftar di Indakop Kabupaten Ponorogo mencapai 836 unit dan 829 unit diantaranya telah berbadan hukum.⁵

3 Bambang Ismawan dan Setyo Budiantoro, "Mapping Microfinance in Indonesia" *Jurnal Ekonomi Rakyat*, (Maret, 2005), http://www.ekonomirakyat.org/edisi_22/artikel_5.htm.

4 Tiga unit BMT itu adalah BMT Surya Mandiri Mlarak, BMT Surya Abadi Jenangan dan BMT Natijatul Ummah Babadan Ponorogo.

5 Sumber data dari dokumentasi Indakop Kabupaten Ponorogo, diambil tanggal 10 Maret 2011.

Pada sisi yang lain, mayoritas penduduk Kabupaten Ponorogo beragama Islam dan cukup relegius. Hal ini seharusnya merupakan salah satu modal yang mendorong lembaga keuangan syar'ah untuk berkembang di daerahnya, namun kenyataannya justru banyak BMT yang bubar. Sebagai lembaga keuangan shari'ah, BMT seharusnya lebih bisa menarik kalangan pengusaha muslim untuk merespon produk-produknya dibanding KSP yang berbasis konvensional. Idealnya peran BMT dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui pembiayaan UKM harus lebih besar dibandingkan dengan KSP.

Bertolak dari latar belakang di atas, maka menurut peneliti, perlu adanya penelitian yang membandingkan antara peran BMT sebagai cerminan dari lembaga keuangan *shari'ah* dan KSP sebagai cerminan lembaga keuangan konvensional dalam pemberdayaan ekonomi umat melalui pengembangan UMK. Dalam hal ini LKM yang dipilih adalah BMT Surya Mandiri dan KSP Baku Makmur di Kabupaten Ponorogo. Kedua lembaga ini sama-sama berdiri pada tahun 1997 dan cukup eksis sampai saat ini.

BMT Surya Mandiri saat ini merupakan BMT yang paling unggul dibanding BMT lainnya di Kabupaten Ponorogo. BMT ini juga memiliki kontribusi yang tinggi dalam pemberdayaan ekonomi umat, diantaranya melalui pembiayaan produktif bagi pedagang-pedagang kaki lima. Sampai saat ini BMT Surya Mandiri memiliki jumlah anggota sebanyak 1.020 orang yang terdiri atas 55 orang anggota tetap dan sisanya merupakan calon anggota, dengan jumlah asset yang dimiliki sampai akhir tahun 2010 mencapai Rp. 3.054.527.505,00.⁶

Sedangkan KSP Baku Makmur merupakan salah satu KSP yang benar-benar menerapkan prinsip-prinsip koperasi dan memiliki perkembangan yang cukup pesat. KSP Baku Makmur ini juga memiliki kontribusi yang besar dalam pemberdayaan ekonomi umat dengan memberikan kucuran dana terhadap UMK-UMK yang ada. Sehingga sampai saat ini KSP Baku Makmur memiliki anggota sebanyak 1.867 orang dan asset sampai akhir tahun 2010 mencapai Rp. 3.120.712.930,00.⁷

Oleh karena itu, sangat urgen kiranya mengangkat fenomena di atas dalam sebuah penelitian yang berjudul "Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Di Kabupaten Ponorogo" dengan

6 Diambil dari Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus RAT BMT Tahun Buku 2010 tanggal 18 Maret 2011..

7 Diambil dari Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus RAT KSP Baku Makmur Krebet Jambon Ponorogo, tanggal 15 Januari 2011.

rumusan masalah sebagai berikut : 1) Bagaimana bentuk pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan oleh BMT Surya Mandiri dan KSP Baku Makmur?; 2) Bagaimana prosedural BMT Surya Mandiri dan KSP Baku Makmur dalam pemberian pembiayaan produktif bagi UKM?; 3) Bagaimana dampak pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan BMT Surya Mandiri dan KSP Baku Makmur terhadap peningkatan usaha UKM?

Jenis penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini juga bersifat kualitatif, karena data-data yang diperoleh dianalisis secara *verbal-deskriptif*.⁸ Sedangkan paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma naturalistik dengan pendekatan fenomenologi yang menekankan hakekat kenyataan sosial dan mempelajari apa yang tampak dalam masyarakat.⁹

Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga, yaitu : (1) *human resources*, yaitu informasi dan pandangan orang-orang yang terlibat dalam pengelolaan, pengembangan dan pembinaan BMT Surya Mandiri dan KSP Baku Makmur di Kabupaten Ponorogo. (2) *phenomenon resources*, yaitu mengamati fenomena aktifitas pengelolaan BMT Surya Mandiri dan KSP Baku Makmur dalam pemberdayaan ekonomi umat. (3) *document resources*, yaitu berupa kebijakan dan kegiatan yang terdokumentasi, baik dari BMT Surya Mandiri dan KSP Baku Makmur dalam pemberdayaan ekonomi umat, maupun dari dinas pemerintahan terkait seperti INDAKOP Kabupaten Ponorogo.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Oleh karena penelitian ini adalah penelitian kualitatif, maka analisis datanya bersifat terbuka (*open ended*) dan induktif.¹⁰ Dengan pola pikir induktif, data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara *deskriptif kualitatif*. Pertama kali da-

8 Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993), 3 ; bandingkan dengan: Robert Bogdan dan Steven J. Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods: a Phenomenological Approach to the Social Sciences* (New York : A Wiley - Interscience Publication, 1975), 45.

9 Lihat, Imam Suprayogo dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 100-101.

10 Dikatakan terbuka karena terbuka bagi perubahan, perbaikan dan penyempurnaan berdasarkan data baru yang masuk. Dikatakan induktif karena berangkat dari fakta-fakta empirik yang berkaitan dengan fenomena dan simbol-simbol aktifitas pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan BMT dan KSP. Lihat S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif* (Bandung: Tarsito, 1996), 29.

lam analisis data ini, penulis menerapkan analisis isi (*content analysis*), yaitu analisis ilmiah tentang isi data (pesan) suatu komunikasi atau fenomena.¹¹ Selain itu, karena penelitian ini termasuk dalam katagori *Field Research* yang berusaha mengkomparasikan dua fenomena, maka data yang telah diperoleh dianalisis juga dengan *Comparative Analysis*, yaitu analisis ilmiah yang bertujuan untuk menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda, orang, prosedur kerja, ide-ide, kritik terhadap orang atau kelompok, terhadap ide atau prosedur kerja.¹²

PEMBAHASAN

A. Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat

1. Lembaga Keuangan Mikro

Lembaga Keuangan Mikro atau *Micro Finance Institution* merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyediaan jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang tidak terlayani oleh Lembaga Keuangan formal dan yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. LKM di Indonesia menurut Bank Indonesia dibagi menjadi dua kategori yaitu LKM yang berwujud bank serta non bank. LKM yang berwujud bank adalah BRI UnitDesa, BPR dan BKD (Badan Kredit Desa). Sedangkan yang bersifat non bank adalah koperasi simpan pinjam (KSP), unit simpan pinjam (USP), lembaga dana kredit pedesaan (LDKP), *baitul mal wattanwil* (BMT), lembaga swadaya masyarakat (LSM), arisan, pola pembiayaan *Grameen*, pola pembiayaan ASA, kelompok swadaya masyarakat (KSM), dan *credit union*. Meskipun BRI Unit Desa dan BPR dikategorikan sebagai LKM, namun akibat persyaratan peminjaman menggunakan metode bank konvensional, pengusaha mikro kebanyakan masih kesulitan mengaksesnya.

Banyaknya jenis lembaga keuangan mikro yang tumbuh dan berkembang di Indonesia menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pengusaha kecil dan mikro yang selama ini belum terjangkau oleh jasa pelayanan keuangan perbankan khususnya bank umum. Lembaga

11 Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif II*, (Yogyakarta: Rakesaraseh, 1990), 76.

12 Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 236.

keuangan mikro ini dapat menumbuhkan minat masyarakat di pedesaan untuk berusaha atau menumbuhkan pengusaha-pengusaha kecil di pedesaan, yang pada akhirnya dapat membantu program pemerintah untuk :

- a. Meningkatkan produktivitas usaha masyarakat kecil di pedesaan.
- b. Meningkatkan pendapatan penduduk desa.
- c. Menciptakan lapangan kerja baru di pedesaan, sehingga dapat memperkecil keinginan masyarakat pedesaan melakukan urbanisasi.
- d. Menunjang program pemerintah dalam mengupayakan pemerataan pendapatan penduduk desa dan upaya pengentasan kemiskinan.

2. Pemberdayaan Ekonomi Umat

Pemberdayaan dilahirkan dari bahasa Inggris, yakni *empowerment*, yang mempunyai makna dasar ‘pemberdayaan’, di mana ‘daya’ bermakna kekuatan (*power*). Bryant & White (1987) menyatakan pemberdayaan sebagai upaya menumbuhkan kekuasaan dan wewenang yang lebih besar kepada masyarakat miskin. Cara dengan menciptakan mekanisme dari dalam (*build-in*) untuk meluruskan keputusan-keputusan alokasi yang adil, yakni dengan menjadikan rakyat mempunyai pengaruh. Sementara Freire (Sutrisno, 1999) menyatakan *empowerment* bukan sekedar memberikan kesempatan rakyat menggunakan sumber daya dan biaya pembangunan saja, tetapi juga upaya untuk mendorong mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur yang opresif.

Sedangkan dalam kajian ini pengertian “pemberdayaan” dimaknai sebagai segala usaha untuk membebaskan masyarakat miskin dari belenggu kemiskinan yang menghasilkan suatu situasi di mana kesempatan-kesempatan ekonomis tertutup bagi mereka, karena kemiskinan yang terjadi tidak bersifat alamiah semata, melainkan hasil berbagai macam faktor yang menyangkut kekuasaan dan kebijakan, maka upaya pemberdayaan juga harus melibatkan kedua faktor tersebut.

Titik fokus konsep pemberdayaan adalah lokalitas, sebab *civil society* menurut masyarakat akan merasa siap diberdayakan melalui isu-isu lokal. Tentunya dengan tidak mengabaikan kekuatan-kekuatan ekonomi dan struktur di luar *civil society* tersebut. Lebih lanjut ia menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat tidak hanya pada sektor ekonomi tetapi juga secara politis, sehingga pada akhirnya masyarakat akan memiliki posisi tawar yang kuat secara nasional maupun inter-

nasional. Target dari konsep pemberdayaan ini adalah ingin mengubah kondisi yang serba sentralistik menjadi situasi yang lebih otonom dengan cara memberikan kesempatan kepada kelompok masyarakat miskin, masyarakat yang kurang mampu dalam banyak aspek kehidupan untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang mereka pilih sendiri. Masyarakat yang berada pada kelompok ini juga diberi kesempatan untuk mengelola dana pembangunan, baik yang berasal dari pemerintah maupun dari pihak luar.¹³

Dalam konsep pemberdayaan, masyarakat dipandang sebagai subyek yang dapat melakukan perubahan, oleh karena diperlukan pendekatan yang lebih dikenal dengan singkatan ACTORS.¹⁴

- a. *Authority* atau wewenang pemberdayaan dilakukan dengan memberikan kepercayaan kepada masyarakat untuk melakukan perubahan yang mengarah pada perbaikan kualitas dan taraf hidup mereka.
- b. *Confidence and competence* atau rasa percaya diri dan kemampuan diri, pemberdayaan dapat diawali dengan menimbulkan dan memupuk rasa percaya diri serta melihat kemampuan bahwa masyarakat sendiri dapat melakukan perubahan.
- c. *Truth* atau keyakinan, untuk dapat berdaya, masyarakat atau seseorang harus yakin bahwa dirinya memiliki potensi untuk dikembangkan.
- d. *Opportunity* atau kesempatan, yakni memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih segala sesuatu yang mereka inginkan sehingga dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang mereka miliki.
- e. *Responsibility* atau tanggung jawab, maksudnya yaitu perlu ditekankan adanya rasa tanggung jawab pada masyarakat terhadap perubahan yang dilakukan.
- f. *Support* atau dukungan, adanya dukungan dari berbagai pihak agar proses perubahan dan pemberdayaan dapat menjadikan masyarakat 'lebih baik'.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ <http://www.pemberdayaan.com/etcetera/energi-sosial-budaya-dan-lokalitas-titik-fokus-konsep-pemberdayaan.html#more-86>, diakses tanggal 12 Februari 2011.

Secara praktis upaya yang merupakan pengeralahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan produktivitasnya. Dengan demikian, rakyat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah ekonomis. Rakyat miskin atau yang berada pada posisi belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat bukan hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya. Dengan demikian, dapatlah diartikan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial.

Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian, tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara sinambung.¹⁵

Ada beberapa tahapan yang harus dilalui dalam pemberdayaan ekonomi umat. Tahap *pertama*, proses penyiapan masyarakat yang akan diberdayakan, apakah kelompok atau individu. Kalau kelompok, sebenarnya itu untuk memberdayakan diri sendiri, Kelompok tadi merumuskan sendiri hak dan kewajiban dan menghidupkan kelompoknya.

Tahapan *kedua*, merumuskan apa yang menjadi masalah dalam kelompok dan mencari solusinya, misalnya masalah ekonomi, bagaimana meningkatkan pendapatan, maka perlu usaha bersama. Dalam usaha bersama membutuhkan pembiayaan, disinilah fungsi LKM dapat memberi pembiayaan untuk pemberdayaan dan tetap melihat tahapan-tahapan prosesnya, bukan meminta pinjaman modal dan langsung dicairkan, karena berarti hal itu tidak akan jalan pemberdayaannya. Dalam tahapan ini LKM berperan sebagai fasilitator. Artinya, LKM sejak awal sudah harus terlibat dalam penyusunan usaha anggota hingga berhasil.

Fungsi LKM dalam proses pemberdayaan di antaranya, *pertama* LKM bisa berperan sebagai inisiator yang bertugas untuk memprakarsai kema-

15 Ginandjar Kartasmita, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat* dalam www.Ginandjar.com

juan suatu usaha anggota. Idealnya di LKM ada staf yang secara khusus menangani persoalan pemberdayaan. Jadi, ia datang ke anggota untuk memberi inisiator untuk kelompok tadi.

Kedua, sebagai fasilitator yang bertugas untuk merumuskan masalah sekaligus solusinya bagi kelompok, apakah kelompok tani, kelompok usaha kecil atau apa saja. Masalah dalam kelompok masyarakat tidak semerta-merta soal dana, kalau soal dana LKM bisa langsung membantu.

Ketiga, sebagai pendamping yang melakukan monitoring atau pemantauan, membimbing proses dalam pelaksanaan dan memberi penilaian serta memberi motivasi kepada anggota. Keterlibatan LKM terhadap usaha kecil tadi harus tuntas hingga akhirnya berhasil dan mandiri. Kemudian mencari kelompok lain lagi. Jadi, paradigma pemberdayaan itu harus melekat dengan LKM.

Pemerintah, sebagai 'agen perubahan' dapat menerapkan kebijakan pemberdayaan masyarakat miskin dengan tiga arah tujuan, yaitu *enabling*, *empowering*, dan *protecting*. *Enabling* maksudnya menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Sedangkan *empowering*, bertujuan untuk memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, yakni dengan menampung berbagai masukan dan menyediakan prasarana dan sarana yang diperlukan. *Protecting*, artinya melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.

B. Temuan dan Analisa Data

1. Peran BMT Surya Mandiri Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat
BMT Surya Mandiri Mlarak Ponorogo, merupakan salah satu BMT yang pernah ada di Kab. Ponorogo yang sampai saat ini masih eksis dan paling unggul dibandingkan dengan BMT lainnya. Karena sesuai data di lapangan, ternyata keberadaan BMT di Kabupaten Ponorogo banyak mengalami likuidasi. Pada tahun 2001 jumlah BMT di Kab. Ponorogo sebanyak 29 unit, dan pada tahun 2011 ini yang masih eksis dan terdaftar di Indakop tinggal 3 unit, termasuk di dalamnya BMT Surya Mandiri.

Pada awalnya BMT Surya Mandiri Siwalan Mlarak didirikan pada tahun 1997 yang hanya dikelola oleh 3 orang pengurus yaitu: ketua, Sekretaris dan Bendahara. BMT ini pada awalnya mempunyai 20 anggota yang terdiri dari seluruh kalangan masyarakat yang masing-masing membayar simpanan pokok sebesar: @ Rp. 25.000 x 20 = Rp. 5.000.000,-. Jadi, pada

masa awal berdirinya BMT hanya bermodalkan Rp. 5.000.000,-.¹⁶

Dalam masa perkembangannya, BMT pernah mengalami masa sulit, yaitu pada masa reformasi atau masa peralihan. Saat ini terjadi inflasi besar-besaran yang mengakibatkan banyak terjadinya kredit macet. Banyak debitur yang mengambil kembali simpanannya. Akan tetapi dengan semangat pantang menyerah dan bekerja keras, BMT sedikit demi sedikit dapat mengatasinya. Dan singkatnya dalam usia 10 tahun lebih sekarang ini sudah dapat membuka dua cabang dan dua sektor riil.

Dalam usahanya untuk memberdayakan ekonomi umat yang dilakukan oleh BMT terangkum dalam dua jenis usaha yang selama ini dilakukan oleh BMT, yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana. Operasional *Bayt al-mál wa altamwíl* (BMT) di Kabupaten Ponorogo, baik penghimpunan dana maupun penyalurannya kepada masyarakat, sedikit banyak mengandung aspek pemberdayaan ekonomi pada umat. Dalam penghimpunan dana, BMT melakukannya dengan cara jemput bola. Hal ini sebenarnya mengajarkan pada masyarakat agar mau menyisihkan dananya untuk ditabung. Bagaimanapun juga, ketika seseorang mempunyai simpanan dana di lembaga keuangan, apalagi kemudian diinvestasikan, maka akan mengurangi kerentanan rumah tangganya terhadap resiko dan guncangan eksternal serta mengakibatkan penurunan kerawanan konsumsi keluarga.

Penghimpunan dana dengan jemput bola iniberarti merupakan salah satu bentuk pemberdayaan dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena, kalau demikian tentu keberadaan manusia akan mudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya yang ada dalam diri manusia itu, dengan mendorong memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Penghimpunan dana yang dilakukan oleh BMT tersebut merupakan salah satu bentuk mobilisasi tabungan dari anggota atau masyarakat yang pada akhirnya manfaatnya akan mereka rasakan sendiri. Hal ini sebagaimana yang tertuang dalam tujuan dasar dari koperasi kredit, yaitu untuk meningkatkan penghematan bagi anggota, memberikan kesempatan bagi dirinya atau orang

¹⁶ Wawancara dengan Bp. Sya'roni, manajer BMT Surya Mandiri pada tanggal 20 Agustus 2011.

lain untuk meminjam dana dari tabungan tersebut dengan berbagai kemudahan, dan mendidik anggota dalam mengelola uangnya dan mengefisienkan pengumpulan sumber daya yang terbatas.¹⁷

Sehingga mobilisasi tabungan adalah sisi lain dari dampak adanya lembaga keuangan. Tabungan adalah salah satu usaha untuk pemberdayaan ekonomi, karena tabungan merupakan dasar untuk mencapai kemandirian finansial dan bagian dari lembaga keuangan mikro untuk menuju swasembada. Bahkan secara makro, dengan adanya tabungan dari masyarakat ini pada akhirnya akan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi.

Begitu pula dalam hal pembiayaan atau pemberian pinjaman, BMT telah melakukan aspek pemberdayaan ekonomi berupa pemberian modal kepada pengusaha mikro dan kecil. Pemberdayaan ini terkesan sederhana karena hanya memberikan dukungan modal, tidak menggunakan rancangan strategi pemberdayaan yang terpola kepada pengusaha mikro dan kecil. Begitu pula dalam hal pembinaan, BMT setelah memberikan dukungan modal belum dibarengi dengan adanya pelatihan dan pembinaan kepada pelaku UKM agar di kemudian hari bisa menjadi mandiri. Apabila BMT telah berkembang cukup mapan, seharusnya BMT juga memprakarsai pengembangan badan usaha sektor riil (BUSRIL) dari pokusma-pokusma (Kelompok Usaha Muamalah) sebagai badan usaha pendamping menggerakkan ekonomi riil rakyat kecil di wilayah kerja BMT tersebut yang manajemennya terpisah sama sekali dari BMT;

Akan tetapi, walaupun demikian, pemberian modal kepada pengusaha mikro dan kecil tersebut paling tidak sudah membuka peluang bagi mereka untuk terus menjalankan usahanya. Di samping itu, pemberian modal pada pengusaha mikro dan kecil juga sudah mengurangi satu problem utama yang dihadapi oleh Usaha Mikro Kecil (UMK) yaitu masalah modal dan mengurangi ketergantungan mereka terhadap para rentenir. Sebagaimana data BPS dalam Wardoyo bahwa masalah modal adalah masalah terbanyak yang dihadapi oleh pengusaha mikro dan kecil.

Dalam melakukan pembiayaan terhadap UKM, BMT Surya mandiri menggunakan sistem *mudárabah*, dengan menentukan besarnya bagi hasil berdasarkan besarnya pokok pinjaman bukan laba. Hal ini dilakukan karena

17 Th. Trisna Ansarli, "Pengadaan Kredit Melalui Mobilisasi Tabungan" dalam *Seri Forum Kuliah dan Monografi : Manajemen Koperasi dan Pengembangannya*, ed. Achmad Rofi'I & Zainal Abidin Syahab (Jakarta : Southeast Asian Forum for Development Alternatif, 1992), 36.

adanya kekhawatiran dari pihak manajemen BMT Surya Mandiri terhadap pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*. Dikhawatirkan nasabah UKM akan selalu melaporkan kerugiannya, dan kalau sudah demikian maka tentunya yang menanggung kerugian adalah pihak BMT, atau minimal laporan dari nasabah tidak sesuai dengan kenyataan, mengingat mereka ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Kalaupun itu adalah akad bagi hasil, maka seharusnya yang diprosentasekan adalah hasilnya, bukan dana pokok pinjaman. Akan tetapi, karena BMT belum siap, baik modal maupun SDM pengelola, ditambah lagi belum adanya kesiapan dan pemahaman masyarakat terkait dengan sistem bagi hasil, maka untuk sementara BMT Surya Mandiri menerapkan bagi hasil berdasarkan besarnya dana pinjaman. Dalam prakteknya BMT “Surya Mandiri” Mlarak menentukan jumlah pembagian keuntungan dalam jumlah yang tetap dari prosentase modal yang diinvestasikan dengan memberikan hak tawar kepada nasabah, namun masih menetapkan standar minimal artinya BMT “Surya Mandiri” tidak mau saling dirugikan dalam kadar keuntungan. Sistem tawar menawar dapat dibenarkan oleh Islam selama kedua belah pihak ridha dengan akad tersebut.

Di sisi lain dalam fiqh, pembagian bagi hasil tidak boleh dihitung berdasarkan prosentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya saja setelah dipotong besarnya modal. Caranya dengan menghitung perkiraan pendapatan yang akan diperoleh nasabah dari proyek yang bersangkutan. Meskipun pembagian bagi hasilnya tidak sesuai dengan teori, namun nasabah memberikan pembagian bagi hasilnya atas dasar kesepakatan antara nasabah dengan pihak BMT. Jadi, antara keduanya melakukan akad *mudharabah* dengan ikhlas dan rela sama rela tidak ada unsur paksaan baik dari pihak nasabah maupun pihak BMT.

2. Peran KSP Baku Makmur Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat
Keberadaan KSP di Kabupaten Ponorogo hampir merata di setiap kecamatan, jumlahnya pun semakin bertambah. Hal ini akan membuat persaingan tersendiri di antara pengelola KSP yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap masyarakat atau nasabah, karena pengelola KSP akan berusaha memberikan pelayanan yang memuaskan kepada anggota atau nasabah. Diantara KSP yang ada di kab. Ponorogo yang benar-benar menerapkan prinsip-prinsip koperasi adalah KSP Baku Makmur Jambon Ponorogo.

Kegiatan operasional yang dilakukan oleh BMT dan KSP Baku Makmur salah satunya adalah program dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat. Operasional itupun terangkum dalam dua jenis kegiatan yang selama ini dilakukan oleh KSP Baku makmur, yaitu penghimpunan dana dan penyaluran dana.

Dalam hal penggalangan dana, usaha yang dilakukan oleh KSP tidak melakukan cara jempot bola tetapi masyarakat yang pro aktif. Peneliti melihat bahwa hal tersebut terjadi karena KSP sudah mendapatkan tempat dan kepercayaan dari masyarakat luas. Keberadaannya sangat membantu pengembangan ekonomi masyarakat sekitarnya terutama dalam hal modal.

Manajemen yang dilakukan KSP Baku Makmur dalam hal penggalangan dana tersebut menurut peneliti sangat sesuai dengan teori tentang koperasi, bahwa koperasi mempunyai prinsip *member based oriented activity* (aktifitas yang berorientasi pada anggota), bukan *capital based oriented activity* (aktifitas yang berorientasi pada modal/pemilik modal), sehingga pembentukan modal sendiri (*equity*) tergantung pada besarnya simpanan-simpanan para anggotanya dan jumlah anggotanya tersebut.¹⁸

Oleh karena itulah, KSP Baku Makmur merupakan koperasi yang benar-benar menerapkan asas-asas koperasi. Pada awalnya modal yang terbentuk sangat terbatas, kemudian dalam perkembangannya, karena usaha koperasi Baku makmur tersebut cukup berhasil dan dipercaya masyarakat, maka modal terpupuk dari cadangan-cadangan sisa hasil usaha (SHU) tiap tahunnya, dan tidak dibentuk dari penyertaan modal dari luar atau dari bukan anggota.

Model penggalangan atau penghimpunan dana sebagaimana di atas, merupakan bentuk pemberdayaan ekonomi kaum lemah. Sebagaimana teori pemberdayaan Ife, bahwa pemberdayaan adalah memberikan kekuasaan kepada kelompok lemah.¹⁹ Sementara pihak yang menyimpan dananya di KSP adalah kebanyakan kelompok lemah, bukan kelompok pengusaha yang ingin menginvestasikan dananya untuk dikelola oleh KSP sebagaimana yang terjadi di KSP-KSPlain yang banyak berkembang saat ini.

18 Tiktik Sartika Partomo, *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2004), 78. Lihat juga, Moch. Khoiril Anwar, *Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro (Studi Tentang Eksistensi Bayt al-Mal wa al-Tamwil dan Koperasi Simpan Pinjam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur)*, (Disertasi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010)

19 Ismail Nawawi, *Pembangunan dan Problema Masyarakat ; Kajian Konsep, Model, Teori Dari Aspek Ekonomi dan Sosiologi*, (Surabaya : PMN, 2006) ,223.

Hal lain yang dilakukan oleh KSP Baku Makmur dalam hal penggalangan dana adalah melakukan kemitraan usaha dengan BK3D. BK3D adalah koperasi induk yang membawahi koperasi-koperasi yang ada di beberapa wilayah Kab. Ponorogo. Kemitraan usaha mengandung pengertian adanya hubungan kerja sama usaha diantara berbagai pihak yang sinergis, bersifat sukarela, dan dilandasi oleh prinsip saling membutuhkan, saling menghidupi, saling memperkuat, dan saling menguntungkan. Prinsip kerja sama seperti itu dapat mengatasi pembatas potensi usaha yang melekat pada satu unit usaha.

Sedangkan dari aspek pemberdayaan ekonomi, keberadaan KSP ini sangat diperlukan, terutama oleh pengusaha kecil yang membutuhkan modal. Sebagaimana yang diungkapkan peneliti sebelumnya bahwa modal adalah problem pertama yang dihadapi pengusaha mikro dan kecil. Hal ini juga sejalan dengan landasan kerja KSP yang merupakan alat dari rumah tangga anggota untuk mandiri dalam mengatasi masalah kekurangan modal (bagi anggota pengusaha) atau kekurangan likuiditas (bagi anggota rumah tangga).²⁰

Di samping itu, dengan memberikan pinjaman modal kepada pengusaha mikro dan kecil berarti KSP sudah membuka peluang bagi pengusaha mikro kecil untuk terus menjalankan usahanya sekaligus memberikan motivasi untuk giat bekerja mendapatkan hasil yang maksimal mengingat adanya denda jika ada keterlambatan dalam mengembalikan pinjaman. Pemberian motivasi tersebut paling tidak sudah termasuk bagian dari pemberdayaan, sebagaimana teori pemberdayaannya Mubyarto bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.

Di samping pemberian modal, KSP Baku Makmur juga melakukan pemberdayaan ekonomi melalui program kemitraan antara koperasi dengan usaha kecil. Dalam hal ini KSP membangun kemitraan dengan kelompok usaha perempuan dengan mengadakan pembinaan manajemen usaha anggota. Pembinaan ini dilakukan karena sebagian besar usaha kecil pada umumnya masih menghadapi kendala dan keterbatasan dalam hal penguasaan teknik produksi, manajemen usaha,

²⁰ Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, *Pedoman Standar Operasional Prosedur Koperasi Simpan Pinjam*, 3.

kemampuan sumber daya manusia, sistem pembukuan keuangan, dan pemasaran.

Jika dihubungkan dengan teori-teori pemberdayaan, operasional yang dilakukan KSP dalam rangka pemberdayaan tersebut sudah memasuki tahapan ketiga yaitu pendampingan, karena selain memberikan dukungan modal dan memotivasi untuk bisa mengembalikannya, juga menggunakan rancangan strategi pemberdayaan yang terpolakan kepada pengusaha mikro dan kecil, khususnya pemberdayaan ekonomi perempuan dan rumah tangga.

3. Dampak Pemberdayaan Ekonomi Umat yang dilakukan oleh BMT Surya Mandiri dan KSP Baku Makmur

Operasional BMT dan KSP yang memberikan pinjaman dana kepada pengusaha mikro dan kecil, mempunyai peran penting dalam pemberdayaan masyarakat, terutama masyarakat miskin yang berkategori *economically active working poor* dan *masyarakat lower income*. Hal ini berpijak dari teorinya Robinson tentang klasifikasi masyarakat miskin bahwa masyarakat miskin sebenarnya terdapat perbedaan klasifikasi yaitu *pertama*, masyarakat yang sangat miskin (*the extreme poor*) yakni mereka yang tidak berpenghasilan dan tidak memiliki kegiatan produktif, *kedua*, masyarakat yang dikategorikan miskin namun memiliki kegiatan ekonomi (*economically active working poor*), dan *ketiga*, masyarakat yang berpenghasilan rendah (*lower income*) yakni mereka yang memiliki penghasilan meskipun tidak banyak.²¹

Kelompok kedua dan ketiga itulah yang selama ini menjadi sasaran BMT dan KSP dalam pemberdayaan ekonomi, karena untuk memberdayakan kedua kelompok tersebut lebih efektif apabila digunakan pendekatan tidak langsung misalnya penciptaan iklim yang kondusif bagi pengembangan UMK atau pemberian berbagai jenis pinjaman mikro. Kedua kelompok masyarakat tersebut akan cenderung tetap berpenghasilan rendah, bahkan bisa menjadi kelompok *the extreme poor* jika kesulitan yang mereka hadapi dalam menjalankan aktifitas usaha tidak terselesaikan, terutama terkait dengan kebutuhan modal.

Upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini lebih menitikberatkan bentuk-bentuk transfer atau subsidi, padahal

21 Wilojo Wirjo Wijono, "Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional : Upaya Kongkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan", *JurnalKajian Ekonomi dan Keuangan*, Edisi Khusus, (Desember, 2005), 4.

dalam rantai kemiskinan tidak selalu harus diatasi dengan cara tersebut. Aspek yang lebih penting adalah memutus mata rantai kemiskinan yang dapat dilakukan antara lain dengan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat miskin menjadi produktif, yang dalam pepatah disebut “*jangan berikan umpannya tapi berikanlah kailnya*”, sehingga sangat relevan jika mengupayakan LKM sebagai salah satu pilar sistem keuangan nasional.

Lembaga keuangan mempunyai fungsi sebagai intermediasi dalam aktifitas suatu perekonomian. Jika fungsi ini berjalan baik, maka lembaga keuangan tersebut dapat menghasilkan nilai tambah. Aktifitas ekonomi di sini tidak membedakan antara usaha yang dilaksanakan tersebut besar atau kecil, karena yang membedakan hanya besarnya nilai tambah berdasarkan skala usaha. Hal ini berarti bahwa usaha kecilpun jika memanfaatkan lembaga keuangan juga akan memberikan kenaikan nilai tambah, sehingga upaya meningkatkan pendapatan masyarakat salah satunya dapat dilakukan dengan cara yang produktif dengan memanfaatkan jasa intermediasi lembaga keuangan, termasuk usaha produktif yang dilakukan oleh masyarakat miskin.

Prosedur pemberian pinjaman atau modal untuk konsumtif maupun produktif yang diberlakukan oleh BMT maupun oleh KSP juga sangat mudah dan cepat. Birokrasinya sederhana tidak berbelit-belit. Hal ini menyebabkan masyarakat senang untuk merespon produk-produk yang ditawarkan oleh BMT Surya Mandiri maupun KSP Baku Makmur. Masyarakat merasa sangat terbantu dengan adanya kedua lembaga tersebut terutama berkaitan dengan modal untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Oleh karenanya wajar jika jumlah nasabah atau anggota dari kedua lembaga tersebut cukup banyak.

Perbedaan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BMT Surya Mandiri dan KSP Baku Makmur adalah terletak pada tahapan pemberdayaannya. Dalam proses pemberdayaan, *pertama* LKM bisa berperan sebagai inisiator yang bertugas untuk memprakarsai kemajuan suatu usaha anggota. Idealnya di LKM ada staf yang secara khusus menangani persoalan pemberdayaan. Jadi, ia datang ke anggota untuk memberi inisiator untuk kelompok tadi. *Kedua*, sebagai fasilitator yang bertugas untuk merumuskan masalah sekaligus solusinya bagi kelompok, apakah kelompok tani, kelompok usaha kecil atau apa saja.

Ketiga, sebagai pendamping yang melakukan monitoring atau pemantauan, membimbing proses dalam pelaksanaan dan memberi

penilaian serta memberi motivasi kepada anggota. Keterlibatan LKM terhadap usaha kecil tadi harus tuntas hingga akhirnya berhasil dan mandiri. Kemudian mencari kelompok lain lagi. Jadi, paradigma pemberdayaan itu harus melekat dengan LKM.

BMT Surya Mandiri dalam pemberdayaan masyarakat masih dilakukan secara individu dan hanya pada tahapan pertama yaitu sebagai inisiator. Pembinaan dan pendampingan kepada nasabah belum dilakukan. Sedangkan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh KSP Baku Makmur dilakukan secara individu maupun kelompok dan sudah memasuki tahap pendampingan. Pembinaan terhadap kelompok usaha khususnya untuk perempuan sudah mulai dilaksanakan walaupun belum maksimal. Dalam hal ini KSP Baku Makmur tidak hanya membantu menyelesaikan masalah keuangan saja, tetapi juga masalah lain yang biasanya dihadapi oleh usaha kecil mikro, misalnya masalah manajemen, pemasaran ataupun masalah teknis lainnya.

Dengan memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat, maka paling tidak ada beberapadampak pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BMT dan KSP, yaitu pertama, meningkatkan produktivitas usaha masyarakat kecil di pedesaan. Dengan adanya tambahan modal dari BMT atau KSP maka masyarakat dapat meningkatkan dan mengembangkan usahanya. Kedua, meningkatkan pendapatan masyarakat. Ketika masyarakat mendapatkan pinjaman dana dari BMT atau KSP, maka mereka akan mampu melanjutkan dan mengembangkan usahanya, dan pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatannya, terutama pendapatan rumah tangganya.

Ketiga, menciptakan lapangan pekerjaan. Dana pinjaman yang diberikan oleh BMT atau KSP akan membuat pengusaha kecil bisa memulai usahanya. Dengan demikian akan ada banyak tenaga kerja yang terserap dalam menjalankan usaha mikro kecil tersebut, terutama penggunaan tenaga kerja keluarga. Di samping itu, pinjaman dana dari BMT atau KSP tersebut juga bisa meningkatkan produktivitas kerja dari para pengusaha.

PENUTUP

Berdasarkan paparan data dan analisis data tentang peran BMT Surya Mandiri dan KSP Baku Makmur dalam pemberdayaan ekonomi umat di Kabupaten Ponorogo, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pertama, Sesuai visi dan misinya, BMT Surya Mandiri telah memprakarsai pengembangan badan usaha sektor riil dari pokusma-pokusma (Kelompok Usaha Muamalah) yang menggerakkan ekonomi riil rakyat kecil di wilayah kerjanya. Pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan oleh BMT Surya Mandiri tersebut baik dalam bentuk penghimpunan maupun penyaluran dana (pembiayaan) masih berada pada tahapan inisiator saja, belum masuk pada tahapan fasilitator dan pendampingan. Karena BMT Surya Mandiri hanya memberikan modal dan motivasi saja, belum melakukan pendampingan dan pembinaan.

Sedangkan pemberdayaan ekonomi umat yang dilakukan oleh KSP Baku Makmur selain dalam bentuk penghimpunan dan penyaluran dana kepada kelompok usaha kecil mikro, juga pemberdayaan dalam bentuk kemitraan kelompok usaha, yaitu berupa pembinaan dan pendampingan kelompok ekonomi perempuan berkaitan dengan manajemen usaha anggota dan ekonomi rumah tangga. Dalam hal ini pemberdayaan yang dilakukan KSP Baku Makmur tersebut sudah masuk tahapan inisiator, fasilitator dan pendampingan. Pembinaan dan pendampingan ini dilakukan karena sebagian besar usaha kecil pada umumnya masih menghadapi kendala dan keterbatasan dalam hal penguasaan teknik produksi, manajemen usaha, kemampuan sumber daya manusia, sistem pembukuan keuangan, dan pemasaran.

Kedua, Prosedural pemberian pembiayaan atau pinjaman produktif bagi UKM di BMT Surya mandiri maupun di KSP Baku Makmur sangat mudah dan cepat, walaupun keduanya mewajibkan persyaratan adanya jaminan. Dalam melakukan pembiayaan terhadap UKM, BMT Surya mandiri menggunakan sistem *mudharabah*, dengan menentukan besarnya bagi hasil berdasarkan besarnya pokok pinjaman bukan laba. Sementara KSP Baku makmur menggunakan sistem bunga yang ringan.

Ketiga, Dampak pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh BMT maupun KSP adalah secara tidak langsung dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Anoraga, Pandji dan Djoko Sudantoko. *Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Ansarli, Trisna. "Pengadaan Kredit Melalui Mobilisasi Tabungan" dalam *Seri Forum Kuliah dan Monografi: Manajemen Koperasi dan Pengembangannya*, ed. Achmad Rofi'i & Zainal Abidin Syahab. Jakarta: Southeast Asian Forum, tt.
- Anwar, Moch. Khoiril. *Eksistensi Lembaga Keuangan Mikro (Studi Tentang Eksistensi Bayt al-Māl wa al-Tamwīl dan Koperasi Simpan Pinjam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur)*, Disertasi IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002.
- Arsyad, Lincoln. "Microfinance and Economic Development: Evidence From Developing Countries" dalam *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, FE UGM, Vol. 21, No. 3, 2006.
- Bashit, Abdul. *Islam dan Manajemen Koperasi*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Bogdan, Robert dan Steven J. Taylor. *Introduction to Qualitative Research Methods: a Phenomenological Approach to the Social Sciences*. New York: A Wiley – Interscience Publicatin, 1975.
- Dumairy. "Lembaga Keuangan Islam; Problem, Tantangannya dan Peluang di Era Reformasi" dalam *Bank Syari'ah; Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, ed. Muhammad. Yogyakarta : Ekonosia, 2002.
- Hadhikusuma, Sutanya Rahardja. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Hasanudin, Nofri. *Pemberdayaan Ekonomi*, lihat <http://portaljakarta.com/peran-ukm-dalam-mendorong-kekompetitifan-perekonomian-indonesia>, diakses tanggal 25 Februari 2011
- Hendayana, Rachmat. "Fenomena Lembaga Keuangan Mikro Dalam Perspektif Pembangunan Pedesaan" dalam <http://www.pse/litbang/deptan.go.id>
- Hendrojogi. *Koperasi: Asas-asas, Tori, dan Praktik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Holsti, Cole R. *Content Analysis for The Social Science and Humanities*, Canada: Departement of Political Science University of British Colombia: 1969.
- <http://www.pemberdayaan.com/etcetera/energi-sosial-budaya-dan-lokalitas-titik-fokus-konsep-pemberdayaan.html#more-86>, diakses tanggal 12 Februari 2011.

- <http://www.pemberdayaan.com/pembangunan/pemberdayaan-enabling-empowering-and-protecting.html#more-90>
- <http://www.pemberdayaan.com/pemberdayaan/konsep-pemberdayaan-membantu-masyarakat-agar-bisa-menolong-dir-sendiri.html#more-82>, diakses tanggal 15 Agustus 2010
- Imam Suprayogo dan Tobroni. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001.
- Ismawan, Bambang dan Setyo Budiantoro. "Mapping Microfinance in Indonesia", *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Maret, 2005, dalam http://www.ekonomirakyat.org/edisi_22/artikel_5.htm.
- Karim, Adiwarmar. *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta : IIIT Indonesia, 2002.
- Kartasapoetra dkk. *Koperasi Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Kartasasmita, Ginandjar. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Kemitraan Guna Mewujudkan Ekonomi Nasional Yang Tangguh Dan Mandiri*, makalah disampaikan Pada Seminar Nasional Lembaga Pembinaan Pengusaha Kecil Menengah dan Koperasi (LP2KMK-GOLKAR) Jakarta, 7 Nopember 1996, www.Ginandjar.com
- Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia , Lampiran Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 96 tahun 2004 tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen.
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No. 91 tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah, Bab I Pasal 1.
- Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus RAT BMT Tahun Buku 2010 tanggal 18 Maret 2011.
- Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus RAT KSP Baku Makmur Kreet Jambon Ponorogo, tanggal 15 Januari 2011
- Mannan, M. Abdul. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif II*, Yogyakarta: Rakesaraseh, 1990.
- Nawawi, Ismail. *Pembangunan dan Problema Masyarakat: Kajian Konsep, Model, Teori Dari Aspek Ekonomi dan Sosiologi*. Surabaya: Putra Media Nusantara, 2006.
- Partomo, Tiktik Sartika. *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.
- Ridwan, Muhammad. *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil (BMT)*. Yogyakarta: UII Press, 2004.

- S. Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik – Kualitatif*. Bandung: Tarsito, 1996.
- Shatiby, Abu Ishaq. *al-Muwáfaqát fi 'Ušul al-Shari'ah*, II. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, tt.
- Sudiran, Florentus. "Pembangunan Perkotaan: Kajian Implementasi Kebijakan Pembangunan Kota Samarinda Menuju Kota yang Bersih dan Rapi" Disertasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2006.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Sumarsono, Soni. *Manajemen Koperasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003.
- Surya, 24 Juni 2009, 5.
- Suyuty, Jalaluddin Abdurrahman. *al-Ašbáh Wa al-Nazáir Fi Qawá'id Wa Furu'i Fiqhi al-Safi'iyah*, Beirut: Dar al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 1983.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Mu'amalah* (Bandung : Pustaka Setia, 2004)
- Wardoyo dan Hendro Prabowo. "Kinerja Lembaga Keuangan Mikro bagi upaya penguatan usaha mikro, kecil dan menengah di wilayah Jabotabek", <http://Staff.gunadarma/publications/files/>, 22 Februari 2011.
- Wijono, Wiloejo Wirjo. "Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Kongkrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan", *Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan*. Edisi Khusus, Desember, 2005.